

## Peta Politik dan Sosio-Ekonomi Pemerintahan Islam Periode Awal (Tinjauan Historis Masa Khulafa' Al-Rasyidun)

Muzaiyana✉

Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya

✉muzaiyana@uinsby.ac.id

### Abstrak:

Karya tulis ini bertujuan untuk (1) Mengetahui percaturan politik kekuasaan Islam pada masa Khulafa' al-Rasyidun. (2) Mendeskripsikan peristiwa suksesi kepemimpinan pemerintahan Islam periode sahabat. (3) Memahami perkembangan politik dan sosial-ekonomi masyarakat Islam dalam dunia Islam periode awal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tehnik studi literatur. Hasil penelurusan data dianalisis menggunakan metode sejarah dan teori *case study*. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) percaturan politik masa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidun dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, pada awal kekuasaan khulafa' al-Rasyidun para sahabat melakukan konsolidasi internal, penguatan ummat walaupun diwarnai pertempuran melawan musuh demi kepentingan yang bersendikan nilai-nilai Islam. Kedua, pada masa paruh kedua pemerintahan, mulai terjadi perselisihan antar sesama muslim yang berujung pada perang saudara. (2) Peristiwa suksesi atau pergantian sistem khalifah pada era khulafa' al-Rasyidun berjalan sesuai mekanisme yang disepakati masa itu, sehingga empat khalifah tersebut berbeda-beda model pengangkatannya. (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Islam pada masa itu berjalan pasang-surut sesuai dengan kondisi dan stabilitas politik. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi korelasi positif bagi umat Islam di Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik Islam dalam konteks hidup berkebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Khulafa' al-Rasyidun; politik Islam; pemerintahan Islam; periode awal

## PENDAHULUAN

Dalam tataran implemtatif, konsep pemerintahan Islam periode awal telah dipraktikkan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya di Madinah. Tulisan ini memfokuskan diskusi tentang pemerintahan Islam masa peradaban umat sejak setelah kematian nabi, yang dalam sejarah populer dengan sebutan masa Khulafa' al-Rasyidun. Dalam beberapa karya sejarah, periode ini umat Islam dipimpin oleh empat orang sahabat pilihan, Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Memaparkan secara keilmuan kronologis proses para Khulafa' al-Rasyidun dalam memimpin umat Islam, menurut hemat penulis, menjadi sangat signifikan untuk digali dan direkonstruksi kembali. Mengingat ketika berita Nabi Muhammad SAW. meninggal

dunia tersebar luas, para sahabat banyak yang panik, bahkan diantara mereka ada yang tidak percaya kabar nabi wafat. Mengutip karya Syalabi,<sup>1</sup> dikisahkan bahwa salah satu sahabat yang sangat mencintai nabi dan terkenal sebagai pembela Islam militan, Umar bin Khattab, tampil berpidato di depan masyarakat umum :

“Jika orang mengatakan bahwa Muhammad adalah meninggal dunia, demi Allah beliau tidaklah meninggal, hanya pergi sementara menghadap Tuhannya sebagaimana Nabi Musa pernah pergi menghadap Tuhan. Demi Allah Rasulullah SAW akan kembali...”

Abu Bakar pun ketika mendengar Nabi Muhammad SAW wafat, bersegera mendatangi rumah beliau dan masuk ke kamarnya. Di sana dijumpai Rasulullah telah terbujur, lalu dibukanya kain yang menutupi mukanya dan Abu Bakar menciumnya sembari berkata: “Alangkah baiknya engkau diwaktu hidup dan di waktu wafat. Seandainya engkau tidak melarang kami menangis akan kucurahkan air mata kami”. Selanjutnya Abu Bakar berjalan keluar dan menemui kerumunan massa seraya berpidato:

“Wahai manusia, barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah SWT., maka Allah hidup selamanya, tidak pernah mati” lalu Abu Bakar membacakan ayat suci Alqur’an berikut ini:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ١٤٤﴾

Artinya:

(Nabi) Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul.<sup>2</sup> Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.<sup>3</sup>

Setelah mendengar pidato Abu Bakar yang tegas tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab segera menyadari bahwa nabi telah wafat. Bahkan terdapat riwayat yang menyatakan, Umar berkata : “Demi Allah, tadinya saya mengira tidak ada di dalam Al-

<sup>1</sup> Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1990), 219-221.

<sup>2</sup> Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah Swt. Para rasul sebelumnya telah wafat. Maka Nabi Muhammad saw. pun akan wafat seperti halnya para rasul terdahulu. Pada waktu perang Uhud berkecamuk, tersiar berita bahwa Nabi Muhammad saw. wafat terbunuh. Berita ini mengacaukan umat Islam sehingga ada yang ingin meminta perlindungan Abu Sufyan (pemimpin kaum Quraisy). Sementara itu, orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad saw. itu betul seorang Nabi, tentu tidak akan wafat terbunuh. Maka, Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk menenteramkan kaum muslim dan membantah perkataan orang munafik.

<sup>3</sup> QS. Ali Imran: 144. Lihat terjemah Kemenag tahun 2019.

Quran ayat seperti yang dibacakan Abu Bakar itu. Saya baru sadar akan ayat ini sesudah dibacakan Abu Bakar”.<sup>4</sup>

Peristiwa Nabi Muhammad SAW. meninggal dunia, sejatinya pertanda telah berakhirnya masa kenabian. Di kota Madinah inilah Nabi Muhammad memiliki dua fungsi otoritas, yakni sebagai seorang pemimpin spiritual dan sekaligus sebagai kepala negara yang mendapatkan tuntunan langsung dari Allah SWT melalui wahyu. Peristiwa ini juga menunjukkan ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW telah mencapai kesempurnaan.<sup>5</sup>

Dalam konteks kepemimpinan, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk atau mewariskan siapa penggantinya yang akan meneruskan misi sucinya.<sup>6</sup> Namun ada hadist Ghadir Khum yang sering dijadikan dalil terhadap warisan kepemimpinannya. Walaupun hadist ini pada akhirnya menuai diskusi yang cukup kompleks antara dua kelompok dalam Islam, yakni kelompok Sunni dan Syiah,<sup>7</sup> dan hingga kini umat masih merasakan dampak perbedaan tersebut.

Peristiwa proses para sahabat memutuskan pengganti Nabi memimpin umat, tampaknya saat itu telah menimbulkan interpretasi beraneka-ragam di kalangan sahabat, yang pada gilirannya menjadi pemicu konflik tajam yang tak berkesudahan antar sesama muslim. Walaupun nabi telah memberikan contoh langsung ditengah-tengah mereka bagaimana praktik menjalin persaudaraan atas nama ukhuwah Islamiyah, yang tercermin dalam peristiwa nabi mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin di Madinah. Namun setelah nabi wafat konflik antar sahabat pun tak dapat dihindari dan nyaris meletus dalam bentuk perang saudara. Bahkan sejarah mencatat, sebagai akibatnya pemakaman jenazah nabi terlambat. Hal ini memberikan ilustrasi betapa masa itu situasi dan kondisi politik umat sedang mengalami krisis. Perbedaan pandangan para sahabat terhadap kepemimpinan inilah, lalu mengakibatkan umat Islam terpolarisasi menjadi beberapa aliran. Masa itu, praktik umat mengimplementasikan nilai-nilai keagamaannya dapat dinyatakan terbagi menjadi tiga arus utama atau tiga kelompok yang terlibat konflik dalam persaingan perebutan kekuasaan, yakni kelompok Anshar, Muhajirin, dan Bani Hashim.

---

<sup>4</sup> Syalabi, *Sejarah*, 221.

<sup>5</sup> Lihat QS. Al-Maidah: 3

<sup>6</sup> Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983

<sup>7</sup> Hamzah Ahmad al-Zain, *Kitab al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 2*, (Kairo: Darul hadist), 2/71 nomor 641.), 175

Dalam konteks ini, penulis mencoba menggali lebih dalam tentang peta politik umat Islam periode sahabat, tepatnya pada masa pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh para sahabat yang mulia, masa *khulaf' al-Rasyidun*. Dimana periode ini merupakan masa pemerintahan Islam yang sangat menekankan tegaknya keadilan dan kebenaran. Para sahabat dipercaya umat memiliki jasa besar dalam merintis dan membawa kemajuan peradaban Islam secara cemerlang. Mereka telah mampu menyelamatkan dasar-dasar dan tradisi agung dari Nabi Muhammad SAW untuk memajukan dan membangun peradaban umat Islam masa itu. Oleh karenanya gelar *Khulafa' ar-Rasyidun*, yang artinya “mendapat bimbingan yang lurus” dianugerahkan atau disematkan kepada mereka. Oleh karenanya tulisan ini menjadi sangat penting dilakukan.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah, yang dilakukan dalam bentuk kajian literatur atau studi pustaka. Beberapa karya tulis sejarah baik berupa buku, artikel jurnal ataupun hasil-hasil penelitian menjadi sumber yang penulis rujuk, diantaranya adalah buku *History of The Arab* karya Philip K. Hitti, kitab *Sirah Ibnu Hisyam*, karya Ibnu Hisyam, dan lain sebagainya.

Secara teknis, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini tentu bertumpu pada empat langkah kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>8</sup> Data-data yang diperoleh dari beberapa literatur relevan, penulis analisis dan interpretasikan. Interpretasi di sini dilakukan bersamaan dengan melalui kerja-kerja rekonstruksi penelitian berdasarkan data terkait sebagaimana topik kajian yang dimaksud.

Dalam aspek historiografi inilah kegiatan rekonstruksi sejarah menjadi penting dan peneliti dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mencermati akurasi sumber-sumber yang diperoleh untuk menopang hasil dan analisis yang penulis berikan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Peta Politik masa al-Khulafa' al-Rasyidun

Stabilitas politik dan ekonomi masyarakat dalam suatu negara berkait-berkelindan dan memiliki pengaruh satu sama lain. Dalam konteks kajian penelitian ini penulis menemukan relevansinya yang cukup signifikan antara keduanya. Berdasarkan karya-

---

<sup>8</sup> Dudung Abdurrahan, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal.63. lihat pula Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi kedua (Yogyakarta: Tiara wacana, 2003), 173.

karya sejarah yang ada, reformasi kepemimpinan *Khulafa ar-Rasyidun*, terdapat empat model mekanisme pemilihan khalifah. Pertama terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama, melalui proses kompromi politik. Kedua terpilihnya Umar sebagai khalifah kedua, melalui rekomendasi khalifah sebelumnya dan disetujui oleh segenap umat Islam. Ketiga naiknya Ustman ke kursi khalifah, melalui proses sidang terbatas (baca: badan formatur), yang anggotanya terdiri dari tujuh orang sahabat terbaik sementara yang satu orang sahabat tanpa hak suara, dimana mereka dianggap memiliki *track record* dan kapabilitas untuk mengemban amanah umat. Keempat melalui *bay'at* langsung oleh umat, seperti terpilihnya Ali b. Abi Thalib kw.

Masa *Khulafa' ar-Rasyidun* pada kepemimpinan khalifah pertama, Abu Bakar as-Shiddiq, adalah benar-benar merupakan masa ujian keberlangsungan agama Islam. Khalifah Abu Bakar ra. memerintah selama dua tahun, pada tahun 632-634 M.<sup>9</sup> Dalam waktu yang cukup singkat itu, Abu Bakar banyak mencurahkan perhatiannya membangun stabilitas dalam negeri, karena sepeninggal Rasulullah saw. masyarakat muslim mengalami dekadensi akidah. Mereka banyak yang murtad dan enggan membayar zakat.<sup>10</sup> Mereka tampak berpandangan, dengan meninggalnya Nabi Muhammad saw., maka perjanjian setia pada agama Islam menjadi batal, sehingga bebas melanggar dan bahkan cenderung untuk kembali menjalankan perilaku hidup dan tindakan-tindakan sebagaimana layaknya pada zaman pra Islam. Untuk itulah, Abu Bakar bertindak tegas kepada mereka yang murtad karena termasuk melanggar esensi syari'at Islam dan Abu Bakar menyatakan perang. Setelah terjadinya pemberontakan orang-orang Yamamah pimpinan Musailamah al-Kadzdzab, yang disertai banyak korban berguguran dari kalangan penghafal al-Qur'an. Kemudian Umar ibn al-Khattab menyarankan Abu Bakar untuk segera melakukan pembukuan al-Qur'an. Program pengumpulan kitab suci Al-Qur'an pun dimulai masa Abu Bakar ini, kendatipun dalam prosesnya menuai diskusi yang cukup panjang di kalangan para sahabat, mengingat hal ini belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

Pada fase berikutnya Abu Bakar juga menghadapi tantangan pengrusakan akidah, yakni memberantas dan memerangi orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Nabi-nabi palsu tersebut, antara lain: Aswad al-'Ansa,<sup>11</sup> Tulaihah al-Kadhdhab,<sup>12</sup> Musailamah al-

---

<sup>9</sup> Hodgson, *The Venture*, 286.

<sup>10</sup> Jalal al-din al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 60.

<sup>11</sup> Al-Dhahabi, *al-Khulafa'*, 8.

<sup>12</sup> Lihat Ibid., 16-17.

Khadhdhab.<sup>13</sup> Perang melawan nabi-nabi palsu tersebut bagi khalifah bukan hanya sekedar ancaman terhadap eksistensi kekuasaan tetapi lebih bernuansa pada politik relijius, dakwah dan penyelamatan akidah umat Islam wajib ditegakkan.

Bagi Lewis, gerakan orang-orang yang melepas kesetiaan (murtad) itu secara politis dipandang sebagai wujud pembangkangan terhadap lembaga khalifah.<sup>14</sup> Sehingga dapat dikatakan, peperangan pecah dan berkobar itu selain dikarenakan motivasi agama juga demi menjaga stabilitas politik, supremasi hukum serta tegaknya persatuan dan kesatuan di bawah wilayah kekuasaannya.

Selanjutnya Umar ibn Khattab ra. adalah masa pembebasan dalam ekspansi politik dan militer ke daerah-daerah luar jazirah Arabia. Wilayah kekuasaan Islam mengalami kemajuan luar biasa pesatnya. Umar dianggap tokoh ideal pelaksanaan hukum Islam sesudah masa Nabi. Kelak menjadi bahan rujukan utama dalam pencarian preseden hukum Islam.

Setelah Umar wafat kursi kekhalifahan berpindah ke tangan Ustman. Ia sangat berjasa dalam merealisasikan penyatuan penulisan al-Qur'an. Pada paruh terakhir masa kepemimpinannya suhu politik di kalangan umat Islam mulai memanas. Khalifah Ustman syahid secara tragis di tangan pemberontak Persia melalui budaknya, Abu Lu'lu'. Peristiwa itu dalam sejarah dikenal dengan *fitnah al-kubra*, yang sudah barang tentu berpengaruh pada tatanan sistem politik umat Islam berikutnya. Ketika sahabat yang mulia sekaligus sepupu dan menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah dengan *disupport* dan *dibay'at* oleh sebagian besar umat Islam, namun kondisi politik tidak mereda bahkan justru semakin *chaos*. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib juga diwarnai dengan hiruk-pikuk pemberontakan. Tetapi pemerintahan Ali bin Thalib merupakan contoh komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dan kerakyatan, di samping kesungguhan di bidang pengetahuan.

### **Mekanisme Pengangkatan *Khulafa' ar-Rasyidun* dan Tipologi Kepemimpinannya**

Peristiwa *Saqifah Bani Sa'idah*,<sup>15</sup> merupakan embrio pertama dan terpenting dalam wacana politik umat Islam periode awal pasca Rasulullah wafat, khususnya yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan. Peristiwa itu memberikan implikasi yang sangat besar bagi percaturan politik umat Islam pada masa-masa selanjutnya. Dari tempat itulah, untuk

---

<sup>13</sup> Ibid., 20-22

<sup>14</sup> Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*, (tt: Pedoman Ilmu, 1988), 39.

<sup>15</sup> Saqifah Bani Sa'idah adalah nama suatu balai pertemuan yang berada di Saqifah, Madinah.

pertama kalinya umat Islam berperan menghadapi dan memutuskan realita sosial politik yang cukup kompleks secara mandiri tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Pengganti beliau harus segera dipilih dan diputuskan. Penggantinya adalah manusia biasa bukan nabi yang maksum, tetapi ia adalah orang-orang yang mendapatkan didikan langsung dari nabi.

Abu Bakar al-Shiddiq berhasil menduduki kursi khalifah pertama, sebagai pengganti Nabi dalam meneruskan perjuangan dakwah Islam di Jazirah Arab khususnya, dan di seantero belahan dunia pada umumnya. Kendatipun tidak ditemukan data konkrit, bahwa sebelumnya dia memiliki ambisi pribadi untuk menduduki jabatan khalifah. Namun naiknya Abu Bakar ke kursi khalifah telah melalui polemik panjang diantara para sahabat, dengan terjadinya perbedaan pendapat yang cukup tajam antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin dalam menentukan siapa yang berhak memegang kendali khalifah.

Kultur *Ashabiyah* yang telah lama dihapuskan Rasulullah, nyaris kembali muncul ke permukaan. Masing-masing suku memiliki calon untuk dipromosikan sebagai kandidat khalifah. Kelompok Anshar menghendaki Sa'ad bin Ubadah, dengan argumentasi bahwa merekalah yang menolong Nabi Muhammad SAW ketika mengalami kesulitan. Namun kelompok Muhajirin tidak setuju, menurutnya pihak Muhajirin lebih berhak memegang jabatan itu karena termasuk kaum yang terlebih dahulu beriman kepada Allah dan rasul-Nya.

Untuk menghindari perpecahan, akhirnya Umar tampil mem-bay'at Abu Bakar ra. sebagai khalifah dan berkata: "Berikan tanganmu, hai Abu Bakar". Lalu kaum Muhajirin dan kaum Anshar turut memberikan bay'at kepada Abu Bakar. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan *Saqifah Bani Sa'idah*. Kendatipun dalam riwayat lain diberitakan keengganan Abu Bakar dalam menerima bay'at-nya. Hal itu tercermin dari dialog keduanya yaitu, Abu Bakar berkata kepada Umar: "Berikan tanganmu, hai Umar, kami akan mem-bay'at-mu," tapi Umar menjawab: "Engkau lebih mulia daripada aku", dan Abu Bakar berkata lagi: "Tetapi engkau lebih kuat daripada aku", Umar bin Khattab menjawab lagi: "Sesungguhnya kekuatanku bersama kemuliaanmu".<sup>16</sup>

Kepribadian dan totalitas komitmen Abu Bakar terhadap nilai-nilai Islam sangat mengagumkan. Hal itu tercermin dalam pidato pelantikannya sebagaimana yang dicatat oleh Ibn Hisham dalam sirahnya:

"Wahai saudara-saudaraku sekalian, saya telah dipilih untuk memimpin kalian, walaupun saya bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. Jika

---

<sup>16</sup> Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Dhahabi, *al-Khulafa' al-Rashidun Min Tarikh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1988), 5.

saya berada di jalan yang benar bantulah saya, tetapi jika saya salah maka luruskanlah. Orang yang lemah diantara kalian adalah kuat di mata saya setelah saya memberikan haknya. Orang yang kuat adalah lemah di mata saya setelah saya menjalankan keadilan baginya. Patuhilah saya selama saya mematuhi perintah Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika saya melanggar perintah Allah dan rasul-Nya, maka kalian tidak usah mematuhi saya.”<sup>17</sup>

Proses pembai’atan yang dilakukan Umar bin Khattab atas Abu Bakar as-Shiddiq untuk menjadi seorang khalifah, merupakan pengalaman politik awal dalam suksesi kepemimpinan pasca Rasulullah wafat. Oleh karena itu timbul berbagai interpretasi, diantaranya, apakah model yang demikian yang dikehendaki melalui pesan moral al-Qur’an dalam menentukan kepemimpinan ataukah ada model lain. Kesuksesan Umar dalam memberikan dukungan sehingga Abu Bakar menjadi khalifah pertama dan kemudian didukung oleh seluruh umat Islam, kecuali Ali,<sup>18</sup> merupakan realitas sosio-politik tentang kecerdikan yang diperankan oleh Umar dalam menginterpretasikan makna teks suci dalam tataran operasional. Namun sebagian kalangan berpendapat bahwa hal itu tidak terlepas dari bagian kharisma dan kewibawaan Umar di mata sahabat yang lain.

Berbeda dengan peristiwa di atas, pengangkatan Umar bin Khattab ra. menjadi khalifah kedua atas rekomendasi dari Abu Bakar ra. Karena Abu Bakar mengkhawatirkan terulangnya kejadian yang lalu ketika tidak diberi petunjuk siapa pengganti khalifah sesudahnya. Disamping itu situasi politik dalam negeri –saat itu- belum kondusif untuk menyerahkan penggantinya kepada umat Islam. Namun demikian, hemat penulis, prosesi naiknya Umar menjadi khalifah yang kedua merupakan bagian dari tipologi kepemimpinan Abu Bakar yang menjalankan roda pemerintahannya terpusat pada dirinya (sentralisasi). Namun demikian, Abu Bakar bukan merupakan tipe pemimpin yang otoriter, mengingat setiap permasalahan umat selalu dipecahkan bersama para sahabat yang lain, sebagaimana pola kepemimpinan Rasulullah SAW.

Hal itu terbukti ketika Abu Bakar akan memutuskan suatu permasalahan, beliau selalu mengundang para sahabat yang terbaik untuk diajak musyawarah, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang dasar hukumnya tidak ditemukan baik di dalam al-Qur’an maupun dari pengalaman bersama Nabi.<sup>19</sup> Seperti persoalan menghadapi kaum *Riddah*, sebelum melancarkan serangan Abu Bakar membawa persoalan ke sidang

<sup>17</sup> Ibn Hisyam, *Syirah ibn Hisyam IV*, (Mesir: Mathba’ah Mustofa al-Bab al-Halabi, 1937), 340-341.

<sup>18</sup> Menurut banyak ahli sejarah, Ali baru berbai’at kepada Abu Bakar setelah Fatimah, istri Ali, dan putri tunggal Nabi, wafat 6 bulan kemudian. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 23.

<sup>19</sup> Abu a’la al-Maududi, *al-Khilafah wa al-Mulk*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), 115.

musyawarah terlebih dahulu, namun para sahabat mengusulkan agar cukup dihadapi dengan cara lunak sebagaimana yang disepakati oleh Umar, sehingga terjadi perdebatan.<sup>20</sup> Persoalan pengkodifikasian al-Qur'an, Abu Bakar juga tidak lupa bermusyawarah dengan para sahabat, karena dianggap sangat penting bagi generasi berikutnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Ustman bin Affan ra. menggantikan Umar bin Khattab ra. sebagai khalifah ketiga dengan melalui sistem dewan musyawarah sahabat pilihan (dewan formatur), yang ditunjuk oleh Umar. Para sahabat tersebut antara lain: Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf,<sup>22</sup> dan ditambah Abdullah bin Umar, putranya, tetapi tanpa hak suara. Menurut Umar, dasar pertimbangan mengapa memilih enam orang tersebut, yang kesemuanya dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, semata-mata karena mereka berenam pernah dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, dan bukan karena mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu.<sup>23</sup>

Menurut beberapa riwayat, Abdurrahman berkeliling kota Madinah untuk mengetahui aspirasi rakyat, mengadakan referendum dan ternyata mereka banyak mendukung Ustman bin Affan, maka ia naik menjadi khalifah ketiga. Mekanisme suksesi yang dijalankan Umar dengan membentuk tim atau badan formatur tersebut merupakan ekspresi perkembangan sistem kenegaraan yang dipimpinnya. Tampaknya hal itu ditempuh –terlepas dari pertimbangan normatif, sebagaimana yang diuraikan di atas, karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga diperlukan sistem ketatanegaraan yang lebih maju, dengan harapan mampu mengakomodasi seluruh kepentingan umat. Pada masa Umar inilah, sistem lembaga pemerintahan mulai dipisah antara lembaga yudikatif dan eksekutif, serta mulai berdiri lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Pada masa pemerintahan Ustman, pola kepemimpinan yang dikembangkan terkesan lebih mementingkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya. Hemat penulis, itu semua terjadi mengingat usia Ustman yang sudah tua, sehingga menjadi tidak berdaya menghadapi klannya sendiri, dan ia pun dengan mudahnya dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya, yang kurang mempunyai komitmen untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Sampai akhirnya roda pemerintahan seolah-olah tidak lagi dikendalikan oleh

---

<sup>20</sup> Keputusan Abu Bakar memerangi kaum murtad adalah dengan argumentasi sabda Nabi yang artinya: "Barangsiapa yang mengganti agamanya, hendaklah diperangi". Lihat Mahmud Muhammad Baballi, *al-Shura Suluk wa al-Iltizam*, (Makkah: Maktabah al-Thaqafah, 1986), 148.

<sup>21</sup> Ibid., 184-185.

<sup>22</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (Britan: Mcmillan,tt), 178.

<sup>23</sup> Sjadzali, *Islam*, 25.

Ustman, sehingga banyak mengundang protes dari berbagai kalangan. Sebagai akibatnya simpatisan dan dukungan ummat semakin merosot. Khalifah Ustman mengemban jabatannya selama dua belas tahun dan berakhir akibat dibunuh oleh Abu lu'lu', budak dari Mughirah bin Shu'bah.<sup>24</sup> Peristiwa yang cukup tragis itu akhirnya menyulut persoalan-persoalan baru dalam tubuh umat Islam, terutama yang terkait dengan mekanisme pemilihan khalifah selanjutnya, dimana tidak ada juklak yang jelas dari khalifah Ustman.

Ali bin Abi Thalib kw. menggantikan Ustman sebagai khalifah keempat dengan dibay'at langsung oleh kaum muslimin secara terbuka di Masjid.<sup>25</sup> Tetapi Gubernur Syiria, Mua'wiyah bin Abi Sufyan menolak Ali. Muawiyah menuntut agar pembunuh Ustman ditangkap secepatnya, sehingga muncul berbagai gejolak, bahkan perang saudarapun tak dapat dihindarinya.<sup>26</sup> Perang *Jamal*, perang *Shiffin*, disertai dengan tewasnya sejumlah sahabat Nabi, menggambarkan mengenai fenomena disintegrasi ummat tengah terjadi pada masa pemerintahan Ali.

Pada gilirannya Ali turun dari tampuk kekhalifahan melalui proses *arbitrase*, kiranya dapat dijadikan pisau analisis untuk menyingkap situasi kepemimpinannya. *Arbitrase* terjadi sebagai upaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Mu'awiyah dengan berkedok tidak terima atas kematian Ustman bin Affan, sehingga timbullah peperangan di daerah *shiffin* dan berakhir dengan membentuk lembaga musyawarah (baca: arbitrase).

Dengan melihat penyelesaian konflik di atas, dapat diketahui bahwa pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Ali lebih bernuansa demokratis, dimana ia menerapkan ajaran-ajaran agama melalui bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan umat. Ali lebih menawarkan jalan damai dengan bermusyawarah terlebih dahulu, saat mendengar keinginan Thalhah, Zubair, dan Aisyah hendak menuntut balas atas kematian Uthman, sebelum pecahnya perang *Jamal*.

Dalam tataran teori dan praktek politik dewasa ini, maka hampir semua landasan politik yang diperankan khalifah diadopsi oleh beberapa negara dalam menjalankan suksesi kepemimpinan. Konsensus politik, sebagaimana yang terjadi pada saat Abu Bakar terpilih merupakan mekanisme yang diperbolehkan dalam teori politik. Al-Ghazali dalam

<sup>24</sup> Sheikh Muhammad al-Khudri al-Bek, *Muhadarat Tarikh al-Umam al-Islamiah (al-Dawlah al-Amawiyah)*, Juz I, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1979), 21.

<sup>25</sup> Abu Jakfar Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Tt.; Dar al-Fikr, tt), 448.

<sup>26</sup> Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Terj. Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999), 310.

teori politiknya menyebutkan bahwa, manakah yang lebih baik, anarki dan kebekuan kehidupan sosial karena tidak adanya seorang penguasa yang tepat untuk diberi kekuasaan, atau mengakui kekuasaan yang ada apapun kekuasaan itu?<sup>27</sup> Dalam konteks ini, al-Ghazali membenarkan sekaligus mengharuskan adanya seorang pimpinan dalam sebuah komunitas negara apapun bentuknya daripada negara tersebut kosong tidak ada yang memimpin. Maka langkah Umar yang membay'at Abu Bakar untuk menjadi pemimpin umat, kiranya dapat dikategorikan dalam klasifikasi teori al-Ghazali tersebut.

Terhadap penunjukan yang dilakukan Abu Bakar kepada Umar, untuk menggantikan kursi kekhalifahan, merupakan pola mekanisme pengangkatan khalifah kedua yang kemudian diadopsi oleh beberapa pemikir muslim. Salah satunya al-Mawardi, pemikir muslim yang melegalkan sistem penunjukan atau pemberian wasiat kepada seseorang yang mempunyai kelayakan untuk menerima jabatan itu. Namun ia mensyaratkan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang imam/khalifah harus mengetahui agar yang ditunjuk itu betul-betul berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi dari yang paling memenuhi syarat.

Mekanisme pengangkatan khalifah ketiga dengan pembentukan tim formatur, juga mendapatkan legalitas teoritis dan menjadi acuan bagi pemikir muslim berikutnya yang kemudian muncul istilah *ahl al-hall wa al-aqd* dalam teori politik Islam, yaitu sebuah lembaga yang mempunyai otoritas untuk memilih seorang calon pemimpin. Sementara pada mekanisme pengangkatan khalifah keempat, merupakan praktik politik yang kemudian banyak diadopsi dalam wacana politik kaum *shi'ah*.

### **Ekspansi Wilayah Masa al-Khulafa al-Rashidun**

Setelah Abu Bakar berhasil melakukan konsolidasi internal pemerintahannya dan sukses mengatasi problema internal, ia mulai mengirimkan kekuatannya melawan Persia dan Romawi. Keduanya dapat dikatakan merupakan dua kubu kekuatan yang jika tidak dilumpuhkan akan mengancam integritas kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kedua kerajaan itu mem-back up kaum pemberontak di dalam negeri. Beberapa pasukan perang lainnya dikirim ke Syria, karena umat Islam memandang Syria merupakan integral dari wilayah Arab. Negeri itu dihuni oleh bangsa Arab dan penduduknya berbicara dalam bahasa Arab. Dengan demikian baik untuk keamanan Arabia maupun untuk pertalian rasial dengan orang-orang Syria, penggabungan Syria sangat penting bagi bangsa Arab.

---

<sup>27</sup> Sir Thomas W. Arnold dan A. Guillaume (ed.), *The Legacy of Islam*, (Oxford: Oxford University, 1931), 302.

Pada masa kekhalifahan Umar tahun 634-644 M,<sup>28</sup> gelombang ekspansi sudah merambah ke Irak, Iran, Syria, Mesir, Palestina, dan sebagian besar wilayah Persia dalam waktu yang cukup singkat, sehingga berubah menjadi suatu kekaisaran yang memiliki kekuatan sangat besar pada waktu itu. Seiring dengan wilayah umat Islam yang mulai meluas maka masalah yang muncul pun semakin kompleks pula. Untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat, khalifah Umar mendirikan beberapa kantor, meletakkan dasar-dasar peradilan dan administrasi, membentuk *baytul mal*, membentuk lembaga musyawarah, mengatur jaringan pos, dan menempatkan pasukan-pasukan di wilayah perbatasan.<sup>29</sup> Terkait dengan meluasnya ekspedisi, peranan tata usaha dan administrasi sangat urgent dan ini tercatat merupakan yang pertama kali dalam lembaran sejarah Islam.

Pada musim haji dijadikan momentum pertemuan antar kepala-kepala daerah di bawah naungan khalifah Umar. Dia menerima dan mendengarkan pengaduan maupun saran dari mereka, dan tidak jarang terjadi dialog untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi bersama.<sup>30</sup> Lisan merupakan satu-satunya sarana komunikasi yang digunakan saat itu, mengingat masih terbatasnya alat tulis, bahkan al-Qur'an pun masih tertulis di pelepah kurma dan tulang-belulang binatang. Tetapi situasi tersebut tidak menjadi halangan bagi para pemimpin umat untuk berkomunikasi.

Pada masa khalifah Uthman, wilayah Arab meluas ke Asia, Afrika Armenia, Tunisia, Cyprus, bagian yang tersisa dari Persia, Transaxonia dan Tabaristan. Beberapa sumber menyatakan, pada paruh pertama Uthman sukses memerintah sebagaimana kedua pendahulunya. Untuk selanjutnya ia lebih banyak menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa pada kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Pada enam tahun pertama pemerintahannya masih berjalan dengan baik, Uthman telah meneruskan Kebijakan-kebijaksanaan Umar tetapi dengan kemampuan yang kurang. Di bawah kekuasaannya telah muncul apa yang disebut kekhalifahan "Umayyah" (karena semua wakil-wakilnya yang efektif, mulai dari Uthman, adalah keluarga Umayyah).<sup>31</sup>

Beberapa tahun kemudian negara mulai mengalami keguncangan, keluhan-keluhan mulai memuncak. Khalifah Uthman mulai menghadapi berbagai kecaman yang dipicu oleh orang-orang yang tidak puas dan merasa dirugikan. Berbagai tuduhan pun mulai

---

<sup>28</sup> Hodgon., *the Venture*, 286.

<sup>29</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Islamiyyah 'Abqariyyat 'Umar*, (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1969), 110.

<sup>30</sup> Ibid., 111.

<sup>31</sup> Hodgon., *the Venture*, 306.

dilimpahkan kepadanya, nepotisme dan lain sebagainya. Akhirnya Uthman mulai mempunyai banyak musuh dari kalangan sahabat Nabi di Madinah, yang tidak banyak berkulit untuk mengendalikannya.<sup>32</sup>

Sementara pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, situasi pemerintahannya semakin tidak menguntungkan, bahkan boleh dikatakan tidak ada masa sedikitpun di dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Oleh karenanya, perhatian Ali lebih tercurahkan untuk memulihkan keadaan di dalam negeri, sehingga ekspansi dan perluasan wilayah luput dari perhatiannya.

### **Situasi Sosio-Ekonomi Masa al-Khulafa al-Rashidun**

Pada pemerintahan Islam periode *Khulafa ar-Rasyidun* ini umat Islam mulai mengenal piranti institusi kenegaraan, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, seperti administrasi, tata usaha, lembaga musyawarah, lembaga keuangan, jawatan pekerjaan umum, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya telah terealisasi dengan baik.

Secara makro situasi sosial umat Islam saat itu masih berada di bawah pranata sosial yang berlandaskan pada ajaran normatif al-Qur'an. Prilaku saling membantu terhadap sesamanya, semangat berkorban demi agama, dan hal-hal lain yang bernilai *amr ma'ruf wa nahi munkar* telah memberikan implikasi positif dalam memperkuat tatanan sosial umat yang bernuansa islami. Namun guncangan terhadap tatanan sosial itu pernah terjadi ketika munculnya sekelompok pembangkang terhadap pemerintahan yang baru dipimpin oleh Abu Bakar, sehingga ia pun mengharuskan merekonstruksi tatanan sosial itu dengan menyatakan perang terhadap mereka.

Guncangan hebat lainnya -yang oleh sebagian cendekiawan dikenal dengan istilah *fitnah kubra*- juga terjadi di akhir masa pemerintahan Uthman, dan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Ustman di tangan lawan politiknya. Masih juga belum reda, kembali pertikaian sesamanya terulang ketika umat Islam terpecah belah menjadi tiga golongan, yaitu kelompok Ali. Muawiyah, dan khawarij sebagai akibat dari proses *arbitrase*. Situasi sosial umat semakin mengalami degradasi menakala ketiga kelompok tersebut lebih mengedapankan *ashabiyah* sampai mencapai puncaknya dengan terbentuknya dinasti Amawiyah.

---

<sup>32</sup> Ibid., 306-308. Juga lihat Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), 58-63.

Ditinjau dari perspektif ekonomi, secara implementatif masa pemerintahan *al-khulafa al-rashidun* telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana dicontohkan nabi. Kesejahteraan rakyat menjadi perhatian utama para khalifah. Diantaranya berkenaan dengan pengaturan harta rampasan perang, setelah dibagi-bagikan kepada yang berhak (tentara) lalu diserahkan kepada negara untuk kepentingan umat, yang ada di bawah tanggungjawab pengelolaan *baitul mal*.<sup>33</sup> Lembaga *baitul mal*,<sup>34</sup> muncul sebagai salah satu respon positif dalam mewujudkan perselisihan dua orang sahabat terkait pembagian harta rampasan perang setelah pertempuran dalam perang badar.

Pada saat itu, Allah menurunkan firman-Nya yang terekam di dalam surat al-Anfal:1, “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan itu milik Allah dan Rasul-Nya, maka bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kalian, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman”. Diriwayatkan Said bin Zubair, ia bertanya kepada Ibn Abbas surat al-Anfal, dan Ibn Abbas menjelaskan surat ini turun saat pertempuran badar, ketika Allah menjelaskan aturan pembagian harta rampasan perang. Allah memberikan otoritas kepada Nabi untuk mempertimbangkan kesejahteraan umat Muslim.

Peristiwa di atas menunjukkan, *baitul mal* pertama didirikan dengan tujuan utama bertanggung jawab dalam mengelola pembagian harta rampasan perang. Nabi memerintahkan agar harta yang diperoleh segera dibagikan kepada umat Muslim yang membutuhkan, serta digunakan untuk membiayai peperangan dan pemerintahan.

Di bawah kepemimpinan Abu Bakr as-Siddiq, *baitul mal* mengembangkan cakupannya lebih dari sekadar mengelola harta rampasan perang, juga mencakup kebijakan pembagian tanah dari orang-orang yang murtad. Sebagian dari tanah-tanah ini diberikan kepada kaum Muslim yang berhak, sementara sisanya dikelola negara.

Secara resmi, pelembagaan *baitul mal* terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab.<sup>35</sup> Seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam, manajemen keuangan menjadi lebih kompleks. Maka Umar memutuskan untuk melembagakan *baitul mal* sebagai lembaga resmi. Umar mendirikan *baitul mal* di setiap wilayah kekuasaan Islam dan

---

<sup>33</sup> Hilman, Jajang, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin." (2022).

<sup>34</sup> Maarif, Moh Ahyar, and Vita Firdausiyah. "Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 137-150.

<sup>35</sup> Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, and Risa Alvia. "Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022): 31-44.

menunjuk pejabat perbendaharaan untuk setiap wilayah. Distribusi kekayaan dilakukan sesuai dengan hukum syariat. *Baitul mal* inilah yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat.

Pada masa kepemimpinan Ustman bin Affan, terjadi perselisihan diantara umat Muslim karena dicurigai adanya penggelapan dana dan masalah lainnya. Kecurigaan ini muncul karena *baitul mal* pada masa itu sering dikelola oleh keluarga khalifah. Kabarnya, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Utsman dalam mengelola *baitul mal* banyak menuai protes dari umat. Padahal data sejarah menunjukkan, masa Ustman bin Affan terdapat kebijakan inovasi dalam bidang perpajakan tanah.<sup>36</sup>

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, *baitul mal* diposisikan lagi seperti sebelum kepemimpinan Utsman. Setiap kebijakan terkait *baitul mal* pada masa Ali sangat ketat untuk mengutamakan kepentingan umat. Ali juga menerima bantuan dari *baitul mal*, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi separuh kakinya, dan bajunya sering diperbaiki dengan tambalan. Selama masa pemerintahannya, kondisi ekonomi negara umat Islam mengalami tantangan dan perubahan, terutama sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa politik yang mengiringi kebijakan dan tindakannya sebagai khalifah.

Namun demikian, upaya-upaya ekspansi wilayah yang dilakukan pada masa pemerintahan khalifah, secara tidak langsung juga telah memberikan kontribusi positif terhadap kondisi ekonomi umat, karena dengan adanya perluasan wilayah di beberapa negara telah membuka jalur perdagangan baru bagi umat sehingga dengan mudah mengembangkan usahanya ke wilayah-wilayah tersebut. Implikasi lainnya dari ekspansi wilayah adalah perbaikan kesejahteraan umat terlaksana melalui tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi rakyat, yakni dengan menjadi tentara yang mendapatkan imbalan harta dari hasil rampasan perang. Dimana hasil rampasan perang itu sebagian disimpan dalam *baitul mal* oleh khalifah, dan digunakan untuk proyek peningkatan kesejahteraan umat.<sup>37</sup>

Dengan demikian dapat dinyatakan dari aspek ekonomi, umat Islam pada masa *al-khulafa' al-rashidun* mempunyai kekuatan ekonomi yang stabil dalam skala nasional, hal itu tidak lepas karena kekuasaan khilafah meliputi semenanjung Arabia, bahkan telah melampauinya, sehingga menjadi super power wilayahnya.

---

<sup>36</sup> Maarif, Ibid.

<sup>37</sup> Al-Aqqad, *Islamiyyat*, 169.

## PENUTUP

Untuk mengakhiri tulisan ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu penulis paparkan di sini, yaitu:

*Pertama*, mekanisme pengangkatan seorang pemimpin di era *Khulafa Al-Rashidun* belum baku, terbukti dari perbedaan dalam proses pengangkatan keempat khalifah tersebut. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan yang bersifat formal normatif, baik dalam menentukan kriteria figur pemimpin, mekanisme pemilihannya, maupun mengenai jangka waktu seorang pemimpin.

*Kedua*, diakui atau tidak fakta menunjukkan bahwa masa *Khulafa Al-Rashidun* telah meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang patut menjadi *uswah* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama tatanan yang berlandaskan pada nilai-nilai normatif sebagaimana yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad saw. Salah satu buktinya adalah komitmen para khalifah dalam menciptakan tatanan sosial ekonomi yang selalu berpihak pada terwujudnya komunitas yang adil dan makmur.

*Ketiga*, secara keseluruhan masa *khulafa' ar-Rasyidun* ini aspek sosio-ekonominya mengalami dampak positif bagi keadaan umat Islam. Kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial meningkat, perdagangan berkembang, dan keadilan sosial ditegakkan. Para khalifah telah menjadi teladan yang sangat baik dan kuat dalam memberikan contoh untuk menghadapi berbagai macam problema dalam masyarakat.

Sebagai penutup karya artikel ini, terdapat sebuah “mutiara hikmah” yang dapat diambil dari sejarah *Khulafa' al-Rashidun* dalam konteks kehidupan bernegara yaitu, untuk mengantisipasi terjadinya *chaos* dan terciptanya *good governance* dalam sebuah negara, maka pemimpin haruslah merupakan seorang individu yang terbaik (*qualified*) dalam arti luas serta mendapatkan legitimasi dari rakyat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Maududi, Abu a'la, *al-Khilafah wa al-Mulk*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- al-Tabari, Abu Jakfar Muhammad bin Jarir, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Tt.; Dar al-Fikr, tt.
- al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Islamiyyah 'Abqariyyat 'Umar*, Kairo: Dar al-Sya'ab, 1969.
- al-Bek, Sheikh Muhammad al-Khudri. *Muhadarat Tarikh al-Umam al-Islamiyah (al-Dawlah al-Amawiyah)*, Juz I, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1979.

- al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad bin Uthman. *al-Khulafa' al-Rashidun Min Tarikh al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1988.
- Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, and Risa Alvia. "Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik." *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1, 2022.
- al-Maududi, Abu a'la. *al-Khilafah wa al-Mulk*, Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- al-Suyuti, Jalal al-din. *Tarikh al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Tabari, Abu Jakfar Muhammad bin Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Tt.; Dar al-Fikr, tt.
- Arnold, Sir Thomas W. dan A. Guillaume (ed.), *The Legacy of Islam*, Oxford: Oxford University, 1931.
- Athir, Ibn. *al Kamil fi al-Tarikh*, Jil. II, Beirut: Dar al-Sadr, 1965.
- Baballi, Mahmud Muhammad. *al-Shura Suluk wa al-Iltizam*, Makkah: Maktabah al-Thaqafah, 1986.
- Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*, tt: Pedoman Ilmu, 1988.
- Dudung Abdurrahan, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Hamzah Ahmad al-Zain, *Kitab al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* 2, Kairo: Darul hadist, 2/71 nomor 641.
- Hilman, Jajang, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Eksistensi Dan Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafaur Rasyidin." (2022).
- Hisyam, Ibn. *Syirah ibn Hisyam IV*, Mesir: Mathba'ah Mustofa al-Bab al-Halabi, 1937.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, Britan: Mcmillan, tt.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Ibn Hisyam, *Syirah ibn Hisyam IV*, (Mesir: Mathba'ah Mustofa al-Bab al-Halabi, 1937), 340-341.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi kedua (Yogyakarta: Tiara wacana, 2003), 173.
- Lewis, Bernard. *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*, tt: Pedoman Ilmu, 1988.
- Maarif, Moh Ahyar, and Vita Firdausiyah. "Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2., 2019.
- Mahmud Muhammad Baballi, *al-Shura Suluk wa al-Iltizam*, Makkah: Maktabah al-Thaqafah, 1986.
- Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, Terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997.



Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Dhahabi, *al-Khulafa' al-Rashidun Min Tarikh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1988), 5.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Sheikh Muhammad al-Khudri al-Bek, *Muhadarat Tarikh al-Umam al-Islamiah (al-Dawlah al-Amawiyah)*, Juz I, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1979.

Sir Thomas W. Arnold dan A. Guillaume (ed.), *The Legacy of Islam*, Oxford: Oxford University, 1931.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1990.